

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN *FISCAL ILLUSION* PADA PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2003-2012**

**Dewi Purwanti Dude, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email :Dewidikidiw@gmail.com

### **ABSTRAK**

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan dan *Fiscal illusion* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012” Tujuan utama dari penelitian ini adalah : untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mendeteksi ilusi fiskal. Adapun untuk alat analisis Kinerja keuangan menggunakan Analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan Rasio pertumbuhan. Metode deteksi ilusi fiskal menggunakan pendekatan pendapatan (*revenue Enchancement*). Hasil Penelitian menunjukkan Dari hasil analisis rasio disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terus membaik. Hal tersebut terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu -rata rasio efektifnya sebesar 106%. Selain efektif kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara efisien dalam memberikan anggaran yang dialokasikan untuk biaya insentif untuk memungut Pendapatan asli daerahnya secara maksimal terlihat dari rata-rata rasio efisiensinya sebesar 2,87%. Walaupun demikian ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan pertumbuhan dimana rata-rata rasio aktivitas belanja rutin 99% sedangkan aktivitas rasio belanja pembangunan hanya sebesar 18%. Selain itu terdapat ilusi fiskal didalam kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

*Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah , Ilusi Fiskal.*

### **ABSTRACT**

*Research object is North Sulawesi Provincial Government with the title or "Analysis of Financial performance and Fiscal illusion In North Sulawesi Provincial Government in 2003-2012" main purpose of this research is to analyze the financial performance of North Sulawesi and detect illusion fiscal year. But for a tool analysis of financial performance ratio using Analysis of financial independence regions, ratio effectiveness, efficiency ratio, ratio ratio activities and growth. Detection method illusion fiscal approach revenue (revenue Enchancement). Results of the study showed From the analysis of the ratio is concluded that in general performance regional financial management and high Financial independence area of North Sulawesi that were getting better. This is seen from some financial performance ratio region, that is -price as effective as the ratio of 106 percent. In addition effective regional financial management and performance level regional autonomy North Sulawesi Provincial government efficient in providing the budget allocated for the expenses incentives to collect the original territory maximally can be seen from price efficiency ratio of 2.87 percent. However there are some financial performance ratio area that continues to decline or have a negative trends such as the ratio activity and growth, which price ratio such routine expenditure 99 percent while such ratio development spending by only 18 percent. In addition, there are no illusions fiscal financial performance in North Sulawesi Provincial Government.*

*Keywords: Financial Performance, PAD, Expenditure, Fiscalillusion.*

## A. PENDAHULUAN

Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah secara efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara lebih mandiri. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat, termasuk mandiri dalam hal keuangan.

Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memberi bantuan dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana yang tercantum dalam UU NO.33 Tahun 2004 Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya. Disamping Dana Perimbangan tersebut Pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendapatannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan.

Perimbangan keuangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan, besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. Namun, kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah. Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) (dalam Bahrul Ulum, 2010:24) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Ilusi fiskal secara sederhana diidentifikasi dari peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah didominasi oleh dana perimbangan.

Menurut Alderete (dalam Priyo, 2006:3) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan (*grants*) yang memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang. Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD (dalam Priyo, 2006 :3). Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi tentang Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi ilusi fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di era otonomi serta mendeteksi fenomena ilusi fiskal pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Analisis determinan kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan persamaan simultan dimana hubungan simultan ditunjukkan oleh hubungan saling mempengaruhi antara PAD dengan belanja daerah provinsi. Metode deteksi ilusi fiskal menggunakan pendekatan

pendapatan (*revenueenchantment*). Sampel penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan antara sisi penerimaan (PAD) dengan sisi pengeluaran (belanja daerah). PAD mampu meningkatkan belanja daerah sebesar 0,67 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta PAD, sedangkan belanja daerah mampu meningkatkan PAD sebesar 0,07 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat ilusi fiskal di dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi.

Witmore 1997 (dalam Bahrul Ulum, 2010:52) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Halim (2001) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (dalam Laras dan Priyo, 2008:5)

Dana transfer/perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan hal di atas, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan publik
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Belanja tidak tersangka.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Teori mengenai ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia bernama Amilcare Puviani. Amilcare Puviani menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuatan keputusan yang memiliki kewenangan dalam institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan yang mampu merubah perilaku keuangan (dalam Priyo dan Puspa, 2009:4). Alderete dalam (Ndadari dan Adi, 2008:3), menguraikan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat indikasi respon yang asimetris terhadap bantuan tersebut. Ndadari dan Adi, 2008 :13 menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah.

Dalam (Priyo, 2009 :3 ) Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (*revenue enhancement*) (Bergstrom dan Goodman, 1973; Dollery dan Worthington, 1999) dan melalui manipulasi belanja (*expenditure manipulation*) . Pengukuran dengan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja. Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal. Sedangkan pengukuran dengan manipulasi belanja, deteksi terjadinya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran. Komponen belanja dimanipulasi (dihilangkan), sehingga diasumsikan sama (*ceteris paribus*) dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri. Semakin besar penerimaan daerah maka besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya juga menjadi semakin besar.

Untuk mengindikasikan adanya perilaku penyimpangan menyimpang pemerintah daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperkirakan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui belanja merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian empiris. Berdasarkan hal tersebut, maka di tarik pertanyaan sebagai berikut bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD provinsi Sulawesi Utara? serta Apakah fenomena ilusi fiskal muncul dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan kinerja keuangan daerah provinsi Sulut Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang muncul dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sulut dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari adanya ilusi fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara didalam menyikapi fenomena yang berkembang sehubungan kinerja keuangan daerah dan ilusi fiskal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif pada rentang waktu antara tahun 2002 - 2012 dengan pertimbangan ketersediaan data. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder *time series*.

Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro dan mudah didapat. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi utara, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan

diperoleh melalui jurnal ilmiah dan perpustakaan FE Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran, maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang akan digunakan dan definisi operasionalnya. Penelitian ini terbagi menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian mengenai deteksi adanya ilusi fiskal dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2003 hingga 2012.

➤ Variabel Penelitian

1. Variabel yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yaitu APBD, Belanja Daerah, DAU, DAK, DBH sedangkan,
2. Penelitian mengenai deteksi ilusi fiskal menggunakan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y) sedangkan PDRB (X1), pajak daerah (X2), HCT(X3), DAU (X4), dan DBH(X5) Adalah variabel independennya.

➤ Definisi Operasional Variabel

1. Analisis Kinerja Keuangan

- APBD adalah Perkiraan Penerimaan Daerah Kota Manado yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan, lain – lain PAD yang sah, yang di ukur dalam satuan Rupiah.
- Belanja daerah adalah Pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado yang terdiri atas Belanja langsung dan tidak langsung yang di ukur dalam Satuan Rupiah/Tahun.
- DAU adalah Transfer Dana dari Pemerintah Pusat yang untuk Pemerintah kota Manadosesuai kebutuhan, yang terdiri dari DAU untuk Propinsi dan DAU untuk Kabupaten/Kota yang di ukur menggunakan satuan Rupiah.
- DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Kota Manado sesuai prioritas nasional yang di ukur dengan satuan Rupiah.
- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah Kota Manado untuk mendanai kebutuhan daerah yang ukur dengan satuan Rupiah.

2. Deteksi Ilusi Fiskal

- Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah provinsi yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Satuan hitung untuk variable belanja daerah adalah juta rupiah.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah provinsi pada satu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dengan satuan hitung juta rupiah.
- Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Satuan hitung pajak daerah dalam penelitian ini adalah juta rupiah.
- *Herfindahl Concentration Taxes* (HCT) Dalam penelitian ini variabel HCT diproksi dengan rasio antara retribusi daerah dengan total penerimaan retribusi provinsi. Penggunaan retribusi dalam proksi HCT mengingat retribusi daerah merupakan komponen terbesar PAD, selain pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi secara langsung dan nyata kepada pembayar. Satuan hitung HCT untuk penelitian ini dinyatakan dalam satuan desimal.

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu untuk penelitian mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan Analisis Rasio keuangan terhadap APBD yang lebih ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim 2002:126) . Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim (2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah , rasio efektivitas, dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan Penelitian mengenai ilusi fiskal menggunakan metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square*). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen (Gujarati, 1999:55).

➤ Metode Analisis Kinerja Keuangan (dalam Oesi, 2013:3)

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan APBD

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas berdasarkan APBD

$$Rasio\ efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

berdasarkan potensi riil

3. Rasio Efisiensi berdasarkan APBD

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4. Rasio Aktivitas terdiri dari

$$Belanja\ Rutin\ terhadap\ APBD = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$Belanja\ pembangunan\ terhadap\ APBD = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan terdiri dari :

$$Persentase\ Pertumbuhan\ PAD = \frac{PAD_{tahun\ p} - PAD_{tahun\ p-1}}{PAD_{tahun\ p-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pertumbuhan Pendapatan} \\ & = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah} \\ & = \frac{\text{Belanja Rutin Tahun } p - \text{Belanja Rutin Tahun } p-1}{\text{Belanja Rutin Tahun } p-1} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan} \\ & = \frac{\text{Belanja Pembangunan Tahun } p - \text{Belanja Pembangunan Tahun } p-1}{\text{Belanja Pembangunan tahun } p-1} \times 100\% \end{aligned}$$

➤ Deteksi Ilusi Fiskal

Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Fungsi persamaan umum yang akan diamati dalam penelitian ini adalah :

$$\ln BD_t = \ln PDRB_{t-1} + \ln TAX_{t-1} + \ln HCT_{t-1} + \ln DAU_{t-1} + \ln DBH_{t-1} + \mu$$

Dimana ;

- BD = Belanja daerah
- PDRB = PDRB daerah
- TAX = Pajak daerah
- HCT = *Herfindahl Concentration Taxes* (HCT)
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DBH = Dana Bagi Hasil

Uji Kesesuaian, Uji t-Parsial (*Partial test*), Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_A : \beta_1 \neq 0$$

Dimana  $\beta_1$  adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter hipotesis biasanya nilai  $\beta$  dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila nilai thitung > tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen.

Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

$$t\text{-tabel} = n - k - 1$$

Dimana :

- $\beta_1$  = koefisien regresi variabel independen ke-i
- Se = standar error dari variabel independen ke-i
- N = jumlah data
- K = jumlah variabel

Uji-F (*Over all test*), Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen. Untuk pengujian F-statistik digunakan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_A : \beta_1 \neq 0 \text{ (ada pengaruh) untuk } i = 1 \dots k$$

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, Jika Fhitung > Ftabel maka  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana :

- $R^2$  = Koefisien determinasi
- K = Banyaknya variabel total yang diperkirakan, satu diantaranya unsur intercept
- n = Jumlah sampelkriteria :
- $H_0$  diterima jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$
- $H_A$  diterima jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X1, dan X2 dan X3 terhadap variasi (naik turunnya) Y digunakan koefisien determinasi. Nilai  $R^2$  digunakan antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terkait Y.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Sulawesi Utara selama periode 2003-2012. Di pilihnya Badan Pusat Statistik karena dalam hal ini pelaporan sangat terbuka dan mengeluarkan pelaporan tentang data variabel dependent dan variabel independent pada tahun 2003-2012. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2003-2012.

**1. Rasio kemandirian keuangan Daerah berdasarkan APBD**

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 1.1** Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah Pendapatan asli daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat (DAK, DAU, dan DBH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2003-2012 (Dalam Ribu Rupiah)

TAHUN	PAD	BANTUAN PEMERINTAH PUSAT	HASIL (%)
2003	119.691.244	271.878.847	44%
2004	147.139.838	244.934.087	60%
2005	198.270.258	275.479.569	72%
2006	211.236.498	442.355.948	48%
2007	252.324.235	496.496.761	51%
2008	322.580.793	613.566.528	53%
2009	331.083.668	674.267.802	49%
2010	418.737.661	650.530.096	64%
2011	451.754.886	703.999.207	64%
2012	633.650.533	933.065.767	68%

Sumber : Data Diolah, BPS Sulut 2013.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan provinsi sulut selama sepuluh tahun anggaran rata-rata 57% % dapat dikategorikan cukup tinggi (diatas 50%) yaitu pada tahun 2003 sebesar 44% terus naik sampai tahun 2005 sebesar 72% dan turun kembali pada tahun 2006 sebesar 48% dan kembali naik hingga tahun 2012 sebesar 68%. Meskipun kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio kemandirian provinsi sulut dikategorikan cukup tinggi namun Dapat dilihat presentase PAD terhadap bantuan pemerintah pusat dari tahun 2003 sampai tahun 2012 mengalami fluktuasi mengikuti tinggi rendahnya bantuan pemerintah pusat (dana transfer) terhadap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari Perkembangan Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat ini berarti sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

**2. Rasio Efektivitas berdasarkan APBD**

$$Rasio\ efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

**Tabel 1.2** Analisis rasio efektivitas Target Terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2003-2012 (dalam Ribu Rupiah)

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	HASIL (%)
2003	115.504.099	125.912.630	109%
2004	137.719.789	147.110.034	107%
2005	177.972.220	193.245.869	109%
2006	208.779.330	218.482.346	105%
2007	240.114.366	251.530.645	105%
2008	292.938.500	316.534.816	108%
2009	317.317.717	331.083.758	104%
2010	389.692.388	417.266.346	107%
2011	516.084.887	535.087.974	104%
2012	599.269.276	624.742.585	104%

Sumber data : , Data diolah, Dispenda Provinsi Sulut 2013

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah provinsi sulawesi utara cukup baik /efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2003 s/d tahun 2012 sebesar 106%. Pada tahun 2003 sebesar 109% menurun pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 104% dan kembali naik paa tahun 2008 sebesar 108% dan terus menurun hingga 104% sampai tahun 2012 akan tetapi semua rasio dinilai sangat efektif karena rasio efektifitas melebihi 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dianggap berhasil dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan .Kinerja pengelolaan keuangan Provinsi sulawesi utara dalam merealisasikan PAD-nya dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendapatan asli daerah dianggap sudah cukup baik jika dilihat dari rasio efektifitas.

### 3. Rasio Efisiensi berdasarkan APBD

$$RasioEfisiensi = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

**Tabel 1.3** Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2003-2012 (Dalam Ribu Rupiah)

TAHUN	PAD	Biaya yang dileluarkan untuk memungut PAD	HASIL (%)
2003	119.691.244	410.361.620	3,43
2004	147.139.838	407.432.468	2,77
2005	198.270.258	465.353.220	2,35
2006	211.236.498	649.758.172	3,08
2007	252.324.235	774.651.376	3,07
2008	322.580.793	913.982.712	2,83
2009	331.083.668	1.034.427.882	3,12
2010	418.737.661	1.137.432.445	2,72
2011	451.754.886	1.297.908.496	2,87
2012	633.650.533	1.572.961.922	2,48

Sumber : Data diolah, BPS Sulut , 2013.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulut dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD secara maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggaran daerahnya dengan baik/efisien. Terlihat Rasio Efisiensi Provinsi Sulut dari tahun ke tahun semakin kecil yaitu pada tahun 2003 sebesar 3,43% Tahun 2005 sebesar 2,3% naik pada tahun 2006 sebesar 3,08 dan terus menurun sampai tahun 2012 sebesar 2,48%.

**4. Rasio Aktivitas berdasarkan APBD**

$$RasioBelanjaRutinTerhadapAPBD = \frac{TotalBelanjaRutin}{APBD} \times 100\%$$

$$RasioBelanjaPembangunanTerhadapAPBD = \frac{TotalBelanjaPembangunan}{APBD} \times 100\%$$

**Tabel 1.4** Analisis RasioAktivitas Total Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total APBD Tahun Anggaran 2003-2012 (dalam Ribu Rupiah).

TAHUN	Belanja Rutin	pendapatan (APBD)	Belanja Pembangunan	Belanja rutin terhadap APBD	Belanja Pembangunan terhadap APBD
2003	410.361.621	391.570.081	53.857.573	105%	14%
2004	407.432.468	413.605.244	29.059.205	99%	7%
2005	465.353.220	488.042.057	51.015.008	95%	10%
2006	649.758.172	653.592.446	69.859.113	99%	11%
2007	774.651.376	807.320.996	68.042.372	96%	8%
2008	913.982.712	965.147.321	437.153.668	95%	45%
2009	1.034.427.882	1.023.349.288	388.025.574	101%	38%
2010	1.137.423.445	1.158.671.349	368.273.478	98%	32%
2011	1.297.908.496	1.259.701.585	2.000.000	103%	0%
2012	1.222.295.084	1.834.908.287	350.596.718	67%	19%

Sumber: Data Diolah, BPS Sulut ,2013

Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio aktivitas terhadap APBD masih sangat rendah dimana selama kurun waktu 10 tahun yaitu pada 2003 s/d 2012 rata-rata aktivitas belanja rutin lebih besar dari pada belanja pembangunan yaitu sebesar 99% untuk rasio aktivitas belanja rutin ,sedangkan rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan.sehingga diperlukan minimalisasi Anggaran belanja rutin guna dialokasikan untuk belanja modal/pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

### 5. Rasio Pertumbuhan berdasarkan APBD

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{\text{tahun } p} - \text{PAD}_{\text{tahun } p-1}}{\text{PAD}_{\text{tahun } p-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pertumbuhan Pendapatan} \\ = \frac{\text{Pendapatan}_{\text{tahun } p} - \text{Pendapatan}_{\text{tahun } p-1}}{\text{Pendapatan}_{\text{tahun } p-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah} \\ = \frac{\text{Belanja Rutin}_{\text{tahun } p} - \text{Belanja Rutin}_{\text{tahun } p-1}}{\text{Belanja Rutin}_{\text{tahun } p-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan} \\ = \frac{\text{Belanja Pembangunan}_{\text{tahun } p} - \text{Belanja Pembangunan}_{\text{tahun } p-1}}{\text{Belanja Pembangunan}_{\text{tahun } p-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

**Tabel 1.5** Hasil analisis Rasio Pertumbuhan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2003-2012

TAHUN	Rasio PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Belanja Rutin (%)	Belanja pembangunan (%)
2003	12,0%			
2004	14,7%	4,1%	4,07	2,9
2005	19,8%	4,8%	4,65	5,1
2006	21,1%	6,5%	6,49	6,9
2007	25,2%	8,1%	7,74	6,8
2008	32,3%	9,7%	9,13	43,7
2009	33,1%	10,2%	10,34	38,8
2010	41,9%	11,5%	11,37	36,8
2011	45,2%	12,5%	13	-73
2012	63,4%	18,3%	12,22	35,5

Sumber: Data diolah, BPS Sulut 2013

Berdasarkan hasil analisis rasio APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2003s/d 2012 apat dilihat bahwa menunjukkan pertumbuhan positif . Terutama pertumbuhan PAD dan Pendapatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain Pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan juga mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2003 s/d 2007 Rasio belanja rutin lebih besar dari pada belanja pembangunan namun sebaliknya pada tahun 2008 s/d 2012 Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan lebih besar dari rasio Belanja rutin meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan sebesar -73% dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan . Kesimpulan Pemerintah Provinsi Sulut memiliki Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan yang baik karena mampu meningkatkan Pertumbuhan PAD dan pendapatan daerahnya . Akan tetapi dari sisi pengeluaran Pemerintah Provinsi sulut memiliki rasio pertumbuhan yang kurang baik dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan belanja rutin dari pada belanja pembangunan.

**Analisis Deteksi Ilusi Fiskal**

Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi OLS, dan jenis data yang diolah berbentuk data panel. Data time series yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2003 s/d 2012, sedangkan cross section meliputi kota/kabupaten di provinsi sulawesi utara. Analisa regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DBH terhadap Belanja Daerah Provinsi sulawesi utara, model yang digunakan adalah :

$$\ln BD_t = \ln PDRB_{t-1} + \ln TAX_{t-1} + \ln HCT_{t-1} + \ln DAU_{t-1} + \ln DBH_{t-1} + \mu$$

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Hasil analisis regresi berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Nilai Koefisien dan Uji t**

Mode 1		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-12.333	2.323		-5.308	.006
	PDRB	1.115	.198	.487	5.632	.005
	pajak daerah	4.00E-006	.082	.000	.000	1.000
	Retribusi	-.006	.003	-.031	-1.900	.130
	DAU	.530	.063	.483	8.467	.001
	DBH	.060	.061	.060	.990	.378

Sumber : data diolah ,2014

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah  $Y = -5.308 + 5.632X_1 + 0.000X_2 + -1.900X_3 + 8.467X_4 + 0.990X_5$
- Nilai konstanta sebesar -12.333 mengandung arti bahwa jika nilai PDRB, Pajak daerah, retribusi, DAU, dan DBH adalah 0, maka Belanja daerah akan sebesar Rp.-12.333 (tetap).
- Nilai koefisien regresi X1 PDRB 1.115 mengandung arti bahwa jika PDRB bertambah sebesar 1.000.000.000 maka belanja daerah akan bertambah sesuai dengan nilai koefisien X1 PDRB. Ceteris paribus
- Nilai koefisien regresi X2 pajak daerah 4.00, mengandung arti bahwa jika nilai pajak daerah bertambah sebesar 1.000.000.000 maka belanja daerah akan bertambah sesuai dengan nilai koefisien X2 pajak daerah. Ceteris paribus
- Nilai koefisien regresi X4 DAU 0.530 mengandung arti bahwa jika nilai DAU bertambah sebesar 1.000.000.000 maka belanja daerah akan bertambah sesuai dengan nilai koefisien X4 DAU.
- Nilai koefisien X5 DBH 0.060, mengandung arti bahwa jika nilai DAU bertambah sebesar 1.000.000.000 maka belanja daerah akan bertambah sesuai dengan nilai koefisien X5 DBH. PDRB, pajak daerah, retribusi, DAU, DBH bertambah sebesar Rp.1.000.000 maka belanja daerah akan bertambah sesuai dengan nilai koefisien X5 . ceteris paribus.
- Dan untuk nilai koefisien X3 -0.006 retribusi memiliki hubungan negative dan signifikan secara statistic, hasil penelitian tersebut terjadi ilusi fiskal.
- Nilai thitung PDRB 5.632 dan nilai thitung DAU adalah 8.467. Nilai t tabel adalah 1,833 yang diperoleh dengan Alpha 5 % dan df sebesar 9 yakni (10-1). Pada sisi yang lain nilai signifikan PDRB (Sig) adalah 0.005 dan nilai signifikan DAU (sig) adalah 0.001 atau lebih kecil dari nilai Alpha sebesar 0,05. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel,

dan nilai sig lebih kecil dari nilai alpha berarti  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa PDRB dan Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk nilai t hitung pajak daerah 0.000, retribusi - 1.900, DBH 0.990. Nilai t tabel 1.833 yang diperoleh dengan alpha 5% dengan df sebesar 9 yakni (10-1) pada nilai signifikan (Sig) pajak daerah 1.000, retribusi 0.130, dan DBH 0.378. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, dan nilai sig lebih besar dari nilai alpha berarti  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa pajak daerah, retribusi, DBH tidak memiliki pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap belanja daerah.

**Uji Korelasi, Kontribusi, dan Pengaruh Simultan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig. Change
1.000(a)	.999	.999	.999	.01854	1239.763	.000

a. Predictors: (Constant), DBH, retribusi, PDRB, DAU, pajak daerah

b. Dependent Variable: belanja daerah

Sumber : data diolah, 2014

Berdasarkan tabel ini maka interpretasi adalah sebagai berikut :

- Nilai F hitung sebesar 1239.763 dengan signifikansi 0,000. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 5 dan jumlah sampel 10 , maka diperoleh nilai Ftabel 3,33. Nilai Fhitung (1239.763) lebih besar dari nilai Ftabel (3,33). Berdasarkan hasil uji F maka variabel bebas PDRB, pajak daerah, distribusi, DAU, dan DBH secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah sebagai variabel terikat.

**Interpretasi hasil dan pembahasan deteksi ilusi fiskal**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diatas maka dapat ditarik beberapa pernyataan yang diperlihatkan pada tabel 4. Sebagai berikut :

Variabel	coeficient	Prob (sig)	keterangan	Kesimpulan
PDRB	1.115	.005	Signifikan	tidak terjadi ilusi fiskal
pajak daerah	4.00E-006	1.000	signifikan	tidak terjadi ilusi fiskal
Retribusi	-.006	.130	signifikan	terjadi ilusi fiskal
DAU	.530	.001	Signifikan	tidak terjadi ilusi fiskal
DBH	.060	.378	Signifikan	tidak terjadi ilusi fiskal
(Constant)	-12.333	.006	variabel Dependen (BD)	

signifikan pada  $\alpha$ 5%

Sumber: datadiolah, 2014

Deteksi ilusi fiskal melalui pendekatan pendapat (revenue enchancement) memiliki asumsi bahwa penambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja (priyo, 2009:3). Hal ini disebabkan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB pajak Daerah, DAU serta DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah . Sedangkan Retribusi daerah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal

setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian priyo (2009) tentang deteksi ilusi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 2001 s/d 2004. Penelitian tersebut menemukan adanya fenomena ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Terdapatnya fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan anggaran pemerintah daerah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Besarnya rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Tidak efisiennya penggunaan dana transfer dalam alokasinya terhadap belanja daerah untuk belanja infrastruktur menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan. Selain itu Kuncoro, 2007 (dalam Bahrul Ulum, 2010:155) saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitusi pajak daerah.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan hasil analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien DAU dan DBH dalam mempengaruhi belanja daerah yang sangat tinggi dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini mengindikasikan belum berhasilnya otonomi daerah ditingkat provinsi.
2. Eksplorasi sumber daya ekonomi ditingkat daerah belum dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat dari fluktuatif dan tidak berpengaruhnya daya pajak terhadap PAD.
3. Akibat Eksplorasi sumber penerimaan daerah yang kurang optimal mengakibatkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sangat rendah. Kondisi seperti ini mengindikasikan rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
4. Terdapat fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah provinsi belum mengalokasikan sumber pendapatannya (termasuk dana perimbangan) secara efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_  
*UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_  
*UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

\_\_\_\_\_  
*UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah*

Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

Bahrul Ulum Rusydi, 2010. "*Analisis Determinan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005 – 2008)*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Badan Pusat Statistik (BPS). Sulawesi Utara Dalam Angka. Berbagai edisi penerbitan, BPS, Sulut Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado

Gujarati, Damodar, 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York

- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Ndadari, Laras Wulandan Adi, Priyo Hari. 2008. *“Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat”*. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Oesi Agustina, 2013. *“Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dan Tingkat Kemandirian daerah di era otonomi Daerah (studi kasus Kota Malang Tahun 2007-2011)”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Priyo Hari Adi 2006, *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)*. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Priyo Hari Adi. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Priyo Hari Adi, 2008. *“Relevansi transfer pemerintah pusat Dengan upayapajak daerah” (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)*, *The 2nd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi, 2007, *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin, Makassar.